

KEMANDIRIAN FISKAL KOTA PALANGKA RAYA: ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2021 – 2024

Danna Solihin
Universitas Palangka Raya
Jl. Yos Sudarso, Palangka Raya
danna.solihin@feb.upr.ac.id

ABSTRACT

This research aims focuses on examining the financial capacity of Palangka Raya City during 2021–2024 period using the Share, Growth, and Elasticity Index approaches. Regional financial capacity serves as an important indicator in assessing the level of fiscal independence and the extent to which a region can reduce its dependence on central government transfers. The research relies on secondary data sourced from BPS, BPKAD, and the Palangka Raya City Budget (APBD) documents, which were then analyzed using a descriptive quantitative method. The results indicate that the Share Index of Palangka Raya's Locally-Generated Revenue (PAD) showed a declining trend from 22.99% in 2021 to 14.08% in 2024, reflecting the relatively low contribution of PAD to total revenue. The PAD Growth Index fluctuated significantly, with a sharp increase in 2021 (60.61%) due to post-pandemic economic recovery, followed by contractions in 2022 (-4.29%) and 2023 (-31.99%), before returning to positive growth in 2024 (5.96%). Meanwhile, the Elasticity Index demonstrates that PAD is still able to respond to economic growth, although its contribution remains relatively small. Overall, the Regional Financial Capacity Index (IKK) averaged only 0.22, placing it in the low category. This finding highlights the city's strong dependence on central government transfers, indicating that Palangka Raya's fiscal independence remains far from optimal. The study recommends optimizing PAD through strengthening the tax base, improving regional asset management, and developing leading economic sectors to enhance the city's fiscal capacity in a sustainable manner.

Keywords: Fiscal Decentralization, Index Share, Growth, Elasticity

PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Indonesia mulai menerapkan otonomi daerah dalam penyelengaraan pemerintahan di daerah. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan dan pertanggungjawaban untuk menata dan mengelola secara mandiri seluruh aspek kegiatan pembangunan di daerahnya sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Karakteristik daerah yang dianggap mampu untuk menerapkan otonomi daerah dalam diantaranya yaitu optimalnya legitimasi dan kompetensi daerah dalam memanfaatkan basis pendapatan keuangannya secara mandiri dengan tingkat ketergantungan seminimal mungkin pada pemerintah pusat (Vurry,dkk: 2018).

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu wujud implementasi kebebasan daerah dalam menata dirinya, artinya pemerintah pusat memberikan diskresi kepada daerah untuk mengendalikan fiskal di daerah diukur dari perspektif pendapatan ataupun belanja. Kemampuan keuangan daerah memiliki peran penting karena mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat mampu merancang program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada dukungan pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah dengan kemampuan fiskal yang lemah menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap transfer dana dari pusat, yang pada akhirnya membatasi ruang inovasi dan fleksibilitas dalam pengelolaan pembangunan. Kondisi umum yang masih terjadi di banyak wilayah Indonesia adalah rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan transfer pusat, termasuk salah satunya Kota Palangka Raya.

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah, terutama jika dibandingkan dengan dominasi transfer fiskal dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi fiskal daerah belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, tantangan yang dihadapi mencakup rendahnya efektivitas pemungutan pajak, terbatasnya basis ekonomi, serta pengelolaan aset daerah yang belum maksimal. Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan dalam mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait kemampuan keuangan daerah di Indonesia. Halim (2014) menemukan bahwa sebagian besar daerah masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang rendah akibat dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan. Sementara itu, Sari dkk. (2021) melalui analisis dengan pendekatan indeks share, growth, dan elastisitas pada daerah tertinggal di Sulawesi Tengah mengungkap bahwa PAD belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. Penelitian Aminuddin & Srihadi (2024) juga menegaskan pentingnya optimalisasi potensi PAD guna meningkatkan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah. Penelitian - penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemandirian fiskal masih menjadi tantangan umum di tingkat daerah, termasuk di Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, penelitian ini relevan dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut kemampuan keuangan daerah Kota Palangka Raya dengan menggunakan

pendekatan indeks share, growth, dan elastisitas. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi fiskal daerah serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang tepat.

Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara mandiri sebagai perwujudan dari prinsip desentralisasi, sedangkan, menurut Halim dan Kusufi (2014) Kemandirian fiskal daerah merefleksikan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik secara otonom. Kapasitas ini ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, yang menjadi pilar utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Menurut Sun'an dan Senuk (2015), melalui desentralisasi fiskal pemerintah pusat menyalurkan dana dari APBN sebagai bagian dari kebijakan keuangan negara guna memastikan *fiscal sustainability* dan merangsang aktivitas perekonomian masyarakat, melalui kebijakan ini diharapkan menghasilkan pemerataan kapasitas fiskal antar daerah yang proporsional dengan tanggung jawab pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. IMF (2015) menegaskan bahwa desentralisasi fiskal merupakan mekanisme transfer kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mencakup hak dalam memperoleh sumber pendapatan serta tanggung jawab dalam melakukan belanja publik. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah diberikan otonomi yang lebih luas dalam mengelola keuangan untuk mendorong efisiensi, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan alokasi anggaran lebih relevan dengan prioritas dan kebutuhan lokal.

Menurut Mardiasmo dalam Hardianto (2024) Desentralisasi fiskal diproyeksikan membawa sejumlah manfaat, di antaranya:

1. Menekan ketimpangan fiskal baik antara pemerintah pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) maupun antar daerah (horizontal fiscal imbalance);
2. Meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mengurangi meminimalisir disparitas pelayanan antarwilayah;
3. Mendorong efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar lebih optimal;
4. Memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta memastikan alokasi transfer ke daerah dilakukan secara tepat sasaran, efisien, berkeadilan, dan tepat waktu;

5. Meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pengukuran Indeks Share, Growth, dan Elastisitas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Palangka Raya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan periode analisis 2021- 2024 yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Pendapatan Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Adapun data penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan indeks kemampuan keuangan daerah dengan mengukur beberapa indeks, diantaranya (Vurry, dkk: 2018):

1. Indeks Share

Indeks ini mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang mengambarkan seberapa besar peran PAD dalam membiayai kebutuhan daerah dibandingkan dengan dana yang berasal dari pemerintah pusat (DAU, DAK, DBH).

$$\text{Indeks Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai share, semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja dari sumber PAD.

2. Indeks Growth (Pertumbuhan)

Indeks ini mengukur tingkat pertumbuhan penerimaan daerah dari waktu ke waktu, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun total pendapatan daerah.

$$\text{Indeks Growth} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

Nilai growth yang positif dan konsisten menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah.

3. Indeks Elastisitas.

Indeks ini mengukur sensitivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Fungsinya untuk melihat seberapa besar peran potensi ekonomi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

$$\text{Elastisitas} = \frac{\text{Laju Pertumbuhan PAD}}{\text{Laju Pertumbuhan PDRB}}$$

$$\text{Laju Pertumbuhan PAD} = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Elastisitas

Nilai	Keterangan
< 1 (Inelastis)	Pertumbuhan PAD lebih lambat dibanding pertumbuhan PDRB
= 1 (Unit Elastis)	Pertumbuhan PAD sejalan dengan pertumbuhan PDRB
> 1 (Elastis)	Pertumbuhan PAD lebih cepat dibanding pertumbuhan PDRB

Sumber : Vurry, dkk: 2018

Tahapan berikut dalam analisis kemampuan keuangan daerah adalah menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) serta mengelompokkan hasilnya berdasarkan metode IKK. Indeks ini diperoleh dari rata-rata tiga komponen, yaitu indeks pertumbuhan (growth), indeks elastisitas, dan indeks share. Dalam penyusunannya, setiap komponen ditetapkan nilai maksimum dan minimum, kemudian dihitung menggunakan persamaan umum yang berlaku:

$$\text{Indeks Z} = \frac{\text{Nilai Z Kondisi Pengukuran} - \text{Nilai Z Kondisi Minimal}}{\text{Nilai Z Kondisi Maksimal} - \text{Nilai Z Kondisi Minimal}}$$

Berdasarkan rumus tersebut, Formulasi IKK dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{IKK} = \frac{Z_G + Z_E + Z_S}{3}$$

Keterangan:

Z_G = Indeks Growth

Z_E = Indeks Elastisitas

Z_S = Indeks Share

Tabel 2. Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00 – 0,33	Terbatas
0,34 – 0,43	Moderat
0,44 – 1,00	Optimal

Sumber: Bappenas (2023) dalam Hidayat, Muhammad dkk (2020)

Tabel 2 menunjukkan bahwa IKK 0,00 – 0,33, berada pada kategori terbatas, artinya kemampuan keuangan daerah masih sangat mengandalkan secara substansial transfer fiskal dari pusat, PAD belum menopang pembiayaan daerah secara mandiri. IKK 0,34 – 0,43 berada pada kategori sedang, artinya daerah mulai menunjukkan kemampuan keuangan yang lebih baik, meskipun kemandirian fiskalnya masih terbatas. IKK 0,44 – 1,00 berada pada kategori tinggi, artinya daerah memiliki kemampuan keuangan yang kuat, PAD berkontribusi besar terhadap pembiayaan, sehingga daerah lebih mandiri secara fiskal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, berikut merupakan data yang digunakan dalam proyek riset, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Data Riset

Tahun	Keterangan (Rupiah)		
	Pendapatan Asli	Total Pendapatan	Pendapatan Domestik
	Daerah (PAD)	Daerah	Regional (PDRB)
2020	180.182.760.993	1.136.832.941.627	20.521.900.000.000
2021	289.399.107.674	1.258.734.512.189	23.708.800.000.000
2022	276.970.679.296	1.296.024.933.961	26.265.100.000.000
2023	188.380.645.283	1.259.296.045.301	28.551.700.000.000
2024	199.606.408.644	1.417.903.755.850	31.221.000.000.000

Sumber: BPS, 2025

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai perkembangan kemampuan keuangan daerah, dilakukan perhitungan terhadap tiga indikator utama, yaitu Indeks Share, Growth dan Elastisitas, sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengukuran Indeks Share

Tahun	Keterangan		
	Pendapatan Asli Daerah (1)	Total Pendapatan Daerah (2)	Indeks Share (1) : (2) x 100% = (3)
2021	289.399.107.674	1.136.832.941.627	22,99
2022	276.970.679.296	1.258.734.512.189	21,37
2023	188.380.645.283	1.296.024.933.961	14,96
2024	199.606.408.644	1.259.296.045.301	14,08

Sumber: data diolah, 2025

Tabel 5. Hasil Pengukuran Indeks Growth

Tahun	Hasil Analisis
2021	$= \frac{289.399.107.674 - 180.182.760.993}{180.182.760.993} \times 100\% = 60,61$
2022	$= \frac{276.970.679.296 - 289.399.107.674}{289.399.107.674} \times 100\% = -4,29$
2023	$= \frac{188.380.645.283 - 276.970.679.296}{276.970.679.296} \times 100\% = -31,99$
2024	$= \frac{199.606.408.644 - 188.380.645.283}{188.380.645.283} \times 100\% = 5,96$

Sumber: data diolah, 2025

Tabel 6. Hasil Pengukuran Indeks Elastisitas

Tahun	Laju Pertumbuhan PAD (1)	Laju Pertumbuhan PDRB (2)	Indeks (3)=(1):(2)
2021	$= \frac{289.399.107.674 - 180.182.760.993}{180.182.760.993} \times 100\% = 60,61$	$= \frac{23.708.800 - 20.521.900}{20.521.900} \times 100\% = 15,53$	3,90
2022	$= \frac{276.970.679.296 - 289.399.107.674}{289.399.107.674} \times 100\% = -4,29$	$= \frac{26.265.100 - 23.708.800}{23.708.800} \times 100\% = 10,78$	-0,40
2023	$= \frac{188.380.645.283 - 276.970.679.296}{276.970.679.296} \times 100\% = -31,99$	$= \frac{28.551.700 - 26.265.100}{26.265.100} \times 100\% = 8,7$	-3,67
2024	$= \frac{199.606.408.644 - 188.380.645.283}{188.380.645.283} \times 100\% = 5,96$	$= \frac{31.221.000 - 28.551.700}{28.551.700} \times 100\% = 9,3$	0,64

Sumber: data diolah, 2025

Selanjutnya dirata-ratakan menjadi indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Hasil perhitungan masing-masing indikator beserta nilai IKK Kota Palangka Raya periode 2021 – 2024

Tabel 7. Ringkasan Hasil Pengukuran Indeks

Keterangan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Share (%)	22,99	21,37	14,96	14,08
Indeks Growth (%)	60,61	-4,29	-31,99	5,96
Indeks Elastisitas (%)	3,90	-0,40	-3,67	0,64
IKK	0	0,52	0,03	0,33

Sumber: Output pengolahan data, 2025

Penyajian data pada tabel 4, ditunjukkan hasil perhitungan indeks share yang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2021 – 2024. Dimana pada tahun 2021, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif tinggi yaitu sebesar 22,99 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 21,37 persen di tahun 2022 dan tren penurunan terus berlanjut di tahun 2023 menjadi 14,96 persen, hingga tahun 2024 menjadi 14,08 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan terjadinya penurunan pada indeks share maka kontribusi PAD sebagai indikator utama dalam mendukung kapasitas fiskal daerah masih terbatas. Mengacu pada data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kota Palangka Raya periode 2020 – 2024, terlihat bahwa sumber terbesar pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat, dengan kontribusi sebesar hampir 77 persen dari total penerimaan daerah, dan trennya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya, Daerah masih bertumpu secara dominan terhadap dana tranfer dari pemerintah pusat, sehingga kemandirian fiskal daerah masih belum optimal

Berdasarkan hasil perhitungan indeks growth di Kota Palangka Raya pada tahun 2021 – 2024 menunjukkan hasil fluktuasi yang cukup signifikan. Hal ini dapat terlihat pada indeks di tahun 2021 menunjukkan angka cukup tinggi sebesar 60,61 persen. Kenaikan tersebut ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan pada komponen-komponen penyusun pendapatan asli daerah diantaranya yaitu kenaikan pada penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta jenis pendapatan sah lainnya, terutama untuk periode 2021, kecenderungan kenaikan pendapatan lain-lain yang sah mengalami nilai yang cukup signifikan yaitu sebesar 148 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini

mengindikasikan bahwa terjadinya peningkatan penerimaan daerah sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yang dapat disebabkan oleh adanya pemulihan aktivitas ekonomi yang berjalan pasca pandemi covid-19 dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Namun hasil perhitungan indeks tersebut mengalami penurunan tajam menjadi -4,29 persen di tahun 2022, dapat diartikan bahwa terjadi kontraksi atau perlambatan dalam pertumbuhan PAD. Tren penurunan ini terus berlanjut hingga di tahun 2023 turun menjadi -31,99 persen. Di tahun 2024, pertumbuhan PAD mengalami kenaikan menjadi 5,96 persen, yang mencerminkan bahwa PAD Kota Palangka Raya mulai kembali tumbuh meskipun dengan pertumbuhan yang masih terbatas.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4, meskipun indeks share dan indeks growth mengalami tren penurunan dan fluktuatif dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2022 – 2024 kondisi indeks elastisitas justru berada pada kategori elastis, hal ini mencerminkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil sehingga berdampak pada melemahnya kemadirian fiskal daerah, akan tetapi PAD tersebut masih memiliki kemampuan merespon pertumbuhan ekonomi secara proporsional, sehingga kondisi fiskal daerah masih cukup baik, tetapi belum dioptimalkan secara maksimal dalam struktur pendapatan daerah. Artinya pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah, secara rata-rata dalam periode 2021 – 2024 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah pada kategori rendah yaitu berada pada posisi 0,22 %, artinya bahwa kemampuan keuangan daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, sehingga PAD belum menopang pembiayaan daerah secara mandiri.

KESIMPULAN

Secara komprehensif, temuan analisis serta pembahasan yang disajikan mengarah pada simpulan bahwa :

1. Indeks share PAD Kota Palangka Raya periode 2021–2024 menunjukkan tren penurunan dari 22,99% (2021) menjadi 14,08% (2024). Hal ini menandakan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah relatif kecil dan menurun dari tahun ke tahun.
2. Indeks growth PAD berfluktuasi signifikan, naik tinggi di 2021 (60,61%) akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi, namun kemudian mengalami kontraksi tajam pada 2022 (-4,29%) dan 2023 (-31,99%), lalu kembali positif pada 2024

(5,96%). Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan PAD belum stabil dan masih rentan terhadap kondisi ekonomi eksternal.

3. Indeks elastisitas pada periode 2022–2024 menunjukkan kondisi elastis. Artinya, meskipun kontribusi PAD masih kecil, namun PAD memiliki kemampuan merespons pertumbuhan ekonomi.
4. Secara keseluruhan, Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD) Kota Palangka Raya selama 2021–2024 rata-rata hanya 0,22% dan termasuk kategori rendah. Hal ini memperlihatkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer pusat, sehingga kemandirian fiskal daerah masih jauh dari optimal.

SARAN

Kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan memberikan dasar bagi rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan basis pajak dan retribusi dengan memperbaiki sistem pemungutan, memperluas objek pajak/retribusi, serta meningkatkan pengawasan agar potensi kebocoran penerimaan dapat diminimalisasi dan perlu pengembangan sumber PAD baru, misalnya dari pengelolaan aset daerah, kerja sama dengan pihak swasta, maupun inovasi layanan publik yang dapat menghasilkan penerimaan sah tanpa membebani masyarakat berlebihan
2. Pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dengan strategi jangka panjang berupa pengembangan sektor unggulan daerah (pariwisata, perdagangan, UMKM, dan sektor produktif lainnya) yang bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah dan elakukan evaluasi rutin terhadap kinerja PAD, terutama pada komponen yang berfluktuasi signifikan, agar bisa diantisipasi sejak dini jika terjadi kontraksi serta perlu sosialisasi dan digitalisasi sistem perpajakan daerah guna meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

REFERENSI

- Aminuddin, Novia dan Srihadi Winarningsih. 2024. Analisis Pengukuran kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah. *Journal of Economics and Business UBS*, Vol. 13, No.1 Januari – Februari 2024.

- International Monetary Fund (IMF). 2015. *Fiscal Decentralization and the Efficiency of Public Service Delivery*. WP/15/59
- Halim, Abdul dan Kusufi. 2014. Seri Bungan Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hardianto, dkk. 2024. Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat). Al – Buhuts, Volume 20 No 1, Juni 2024.
- Hidayat, Muhammad dkk. 2020. Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol. 10 No. 2, Desember 2020
- Sari, Rycha Kuwara, dkk. 2021. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Kajian Ilmiah, Vol. 21, No.1, Januari 2021.
- Sun'an, Muammil & Senuk Abdurrahman. 2015. Ekonomi Pembangunan Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Vurry, Anjar Nora, dkk. 2018. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Trend Pads Pemerintah Kabupaten Buleleng. Bisma: Jurnal Manajemen, Vo. 4, No.2, Oktober Tahun 2018.